Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik
Volume 6. No. 2. (2023), hlm 30-39
ISSN Online: 2621-6906
Journal Homepage : https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DALAM MEMAJUKAN WISATA BUDAYA PADA TAHUN 2023

Syarifa Yusrifa[1,]; Dr. H, Burhanuddin, M. Si[2,]

[1,2]Program Studi Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat; yusrifahsyarifa@gmail.com , burhanuddinidris@yahoo.co.id
*Correspondence : yusrifahsyarifa@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi dari tempat Wisata budaya juga besar pengaruhnya untuk memberdayakan budaya terlepas dari usaha memperkenalkannya kepada masyarakat. Untuk menarik minat masyarakat mengunjungi pariwisata budaya berbanding lurus dengan seberapa menarik objek wisata tersebut, sehingga pemerintah harus memperhatikan kebijakan, program serta sumber daya manusia untuk mendukung pelestarian budaya melalui pariwisata budaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya untuk memajukan wisata budaya dengan mempertimbangkan kondisi wisata budaya sebelum adanya kebijakan tentang kebudayaan Kabupaten Majene pada tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan objek penelitian yaitu pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan beberapa lokasi wisata budaya. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dan observasi langsung di lokasi wisata budaya. Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling yang memenuhi kriteria terutama berkaitan dengan penyelenggaraan wisata budaya. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kondisi wisata budaya cukup memprihatinkan, fasilitas pendukung tidak memadai sehingga pengunjung menjadi tidak nyaman karena fasilitas yang sudah tua, kurangnya sumber daya manusia sebagai pemandu wisata di setiap objek wisata, serta tidak ada penambahan jumlah wisata budaya yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari tahun ke tahun karena kurangnya eksplorasi tempat wisata sedangkan sudah banyak tempat baru yang diketahui. Pemerintah daerah selalu melakukan kunjungan ke tempat wisata untuk mengecek kondisinya tetapi keluhan tidak ditindaklanjuti.

Kata kunci
Kebijakan, Pariwisata., Pemerintah Daerah, Wisata Budaya

ABSTRACT

The condition of cultural tourism sites greatly influences the empowerment of culture, aside from efforts to introduce it to the public. The appeal of cultural tourism to the public is directly proportional to how attractive the tourist sites are, requiring the government to focus on policies, programs, and human resources to support cultural preservation through cultural tourism. This study was conducted to understand the efforts to advance cultural tourism by considering the condition of cultural tourism before the implementation of cultural policies in Majene Regency in 2023. The research method used is descriptive qualitative, with the research objects being the Office of Culture and Tourism and several cultural tourism locations. Data collection methods include conducting in-depth interviews with informants and direct observations at cultural tourism sites. Informants were selected

DOI: http://dx.doi.org/10.31605/arajang.v6i2

Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik
Volume 6. No. 2. (2023), hlm 30-39
ISSN Online: 2621-6906
Journal Homepage : https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang

using purposive sampling techniques that meet criteria primarily related to the organization of cultural tourism. The study concluded that the condition of cultural tourism is quite concerning, with inadequate supporting facilities causing discomfort for visitors due to outdated amenities, a lack of human resources as tour guides at each tourist site, and no increase in the number of cultural tourism sites managed by the Department of Culture and Tourism over the years due to insufficient exploration of new tourist spots, despite the discovery of many new places. The local government regularly visits tourism sites to check their conditions, but complaints are not followed up on.

Keywords
Cultural Tourism , Local Government, Policy, Tourism

Pendahuluan

Pariwisata berbasis budaya memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu maka eksistensi nilai kearifan budaya lokal nusantara sebagai bagian terintegrasi dari kebudayaan nasional sangat diperlukan. Sektor pariwisata menjadi aspek yang begitu penting dalam menyumbang kemajuan perekonomian negara karena sektor tersebut secara langsung menyumbang devisa negara selama bertahun-tahun. Budaya lokal di Indonesia ini sangatlah beragam karena Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya dengan nilai-nilai yang luhur sepatutnya kita lestarikan agar tidak terjadi pergeseran budaya yang dapat menghambat tercapainya tujuan nasional (Suparno et al., 2018).

Potensi Pariwisata berbasis budaya yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Majene sangatlah banyak mengingat sejarah panjang masyarakat Sulawesi. Pariwisata budaya tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Majene dengan bantuan banyak pihak. Tak terlepas dari hubungan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kearifan budaya lokal Kabupaten Majene, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan lembaga masyarakat adat di Majene. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat harus terus selalu terjalin untuk pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya. Untuk menjaga hubungan tersebut pemerintah harus memberikan perhatian lebih banyak melalui pendekatan yang strategis dengan memberi jaminan atas pariwisata budaya.

Pemerintah daerah Kabupaten Majene terus berupaya agar Wisata Budaya Majene semakin terjaga, tercatat banyak peninggalan warisan budaya yang didata dan dihimpun oleh dinas kebudayaan dan pariwisata. Selain itu pada Rapat Paripurna Penyerahan Usulan Properda Kabupaten Majene tahun 2022 diusulkan 13 Rancangan Peraruran Daerah yang diantaranya adalah Raperda Pelestarian Budaya Lokal Daerah dan Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Majene (*Propemperda 2022, Pemda Majene Usul 13 Ranperda - Protokol & Komunikasi Pimpinan*, n.d.).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan Daerah memiliki ruang lingkung meliputi: kebudayaan; kesenian tradisional; sejarah; cagar budaya; permuseuman; pemajuan kebudayaan Sampai dengan peran serta masyarakat. Kebudayaan sendiri terdiri dari pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat. Salah satu wisata budaya yang ada di Majene adalah

DOI: http://dx.doi.org/10.31605/arajang.v6i2

Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik
Volume 6. No. 2. (2023), hlm 30-39
ISSN Online: 2621-6906
Journal Homepage : https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang

Museum Mandar Majene yang menyimpan sekitar 1.312 koleksi dari jenis koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, numanismatik, heraldik, filologi, keramik dan senirupa. Didirikan pada tanggal tanggal 2 Agustus 1984 yang berlokasi di bangunan bekas Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene di Jl. Raden Suradi Majene. Museum sebagai bangunan cagar budaya menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada pasal 11 merupakan lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi berupa benda dan bangunan yang telah di tetapkan menjadi tanggung jawab pengelola museum. Pemanfaatan tersebut dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial atau pariwisata.

Meski dilakukan beberapa usaha untuk memperkenalkan Museum Mandar Majene yang memiliki banyak peninggalan sejarah dari masa kolonial hingga kemerdekaan, tetapi ketika masyarakat mengunjungi museum tidak terlihat daya tarik yang signifikan. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi museum yang tidak terurus, fasilitas yang tidak memadai seperti cat bangunan di beberapa ruangan yang sudah lama tidak di cat ulang dan beberapa koleksi foto yang tidak tergantung hingga koleksi yang kotor. Dalam hal pelayanan juga tidak begitu baik dikarenakan tidak adanya pemandu wisata yang disediakan oleh museum mengingat bahwa banyak masyarakat terutama pelajar yang ketika melakukan kunjungan membutuhkan banyak informasi terkait koleksi yang ada.

Dengan demikian kondisi dari tempat Wisata budaya juga besar pengaruhnya untuk memberdayakan budaya terlepas dari usaha memperkenalkannya kepada masyarakat. Untuk menarik minat masyarakat untuk mengunjungi pariwisata budaya berbanding lurus dengan seberapa menarik objek wisata tersebut, sehingga pemerintah harus memperhatikan kebijakan, program serta sumber daya manusia untuk mendukung pelestarian budaya melalui pariwisata budaya.

Metode

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Majene dalam memajukan wisata budaya yang terfokus pada budaya lokal Museum Mandar Majene. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Teknik Pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Letak Geografis Kabupaten Majene

Secara astronomis, Kabupaten Majene terletak antara 20 38’ 45” - 30 38’ 15” Lintang Selatan dan antara 1180 45’ 00” - 1190 4’ 45” Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Majene berbatasan dengan Kabupaten Mamuju di

DOI: http://dx.doi.org/10.31605/arajang.v6i2

Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik
Volume 6. No. 2. (2023), hlm 30-39
ISSN Online: 2621-6906
Journal Homepage : https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang

sebelah utara dan Kabupaten Polewali Mandar sebelah timur, Batas sebelah selatan dan barat masing-masing Teluk Mandar dan Selat Makassar. Sampai Akhir tahun 2021, wilayah administrasi Kabupaten Majene terdiri dari 8 wilayah kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Banggae (25,15 km2), Banggae Timur (30,04 km2), Pamboang (70,19 km2), Sendana (82,24 km2), Tammerodo (55,40 km2), Tubo Sendana (41,17 km2), Malunda (187,65 km2), Serta Ulumanda (456,00 km2.

2. Wisata dan Fasilitas Penunjang Kabupaten Majene

Pariwisata Pada tahun 2021, jumlah wisatawan di Kabupaten Majene sebanyak 133.838 orang, 2 mancanegara dan 133.836 wisatawan domestik, serta terdapat 10 obyek wisata alam, 17 wisata bahari, dan 90 wisata budaya di Kabupaten Majene. Pada tahun 2021, jumlah hotel di kabupaten Majene sebanyak 16 hotel, 3 fasilitas hiburan, dan 95 restoran/ rumah makam yang tersebar pada kecamatan Banggae, Banggae Timur, dan Malunda. Dari 90 total tempat wisata budaya berikut adalah deskripsi dan letak beberapa wisata budaya yakni: Makam Raja-raja dan Hadat Banggae yang berlokasi di Puncak Ondongan, Desa Pangali-ali. Dalam makam tersebut terdapat 480 makam yang terbuat dari berbagai bahan, seperti batu tanah, batu lava atau kayu. Makam tersebut diperkirakan sudah ada sejak abad ke16 dan ke-17. Lalu ada Makam Syeh Abdul Mannan yang terletak di Salabose, kelurahan Pangali-ali, dengan luas wilayah sekitar 1 Hektar yang telah berusia ratusan tahun. Syeh Abdul Mannan merupakan pendakwah ajaran islam, sehingga makam tersebut sering didatangi oleh peziarah dari berbagai daerah. Selanjutnya masjid Salabose yang berada di puncak bukit Salabose Kelurahan Pangali-ali yang telah dibangun pada abad ke-16. Di dalam mesjid tersebut terdapat Al-Qur'an tertua yang di tulis tangan dengan tinta dari pohon kayu.

3. Kondisi Wisata Budaya Kabupaten Majene

Pariwisata budaya di Kabupaten Majene memiliki potensi yang sangat banyak, namun hanya ada beberapa tempat wisata budaya yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan benar-benar diawasi diberdayakan di jaga dengan baik. Ada beberapa wisata budaya yang hanya diketahui tapi tidak dilakukan pengawasan dan perawatan, terutama makam yang ada di sekitar kawasan penduduk.Hanya ada 5 tempat wisata yang keadaannya sedikit lebih terawat dibandingkan tempat lainnya yakni, Museum Mandar Majene, Makam Raja-raja dan Hadat Banggae serta Komp. Makam Mara'dia Parappe yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, lalu Komp. Makam Syekh Abdul Mannan dan Masjid Kuno Salabose yang di kelola oleh masyarakat. Sedangkan dari data yang diperoleh peneliti di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat total 90 tempat wisata budaya yang diketahui oleh dinas.

DOI: http://dx.doi.org/10.31605/arajang.v6i2

Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik
Volume 6. No. 2. (2023), hlm 30-39
ISSN Online: 2621-6906
Journal Homepage : https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang

Peneliti melakukan penelitian di dua tempat wisata budaya yang di kelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yakni Makam Raja-raja dan Hadat Banggae dan juga Museum Mandar Majene, untuk mengetahui bagaimana kondisi dari pengelolaan fasilitas dan sumber daya wisata budaya tersebut. Wisata budaya yang di kelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak memberikan jaminan atas kualitas dan pemenuhan kebutuhan yang memadai untuk penyelenggaraan tempat wisata. Mengingat bahwa air merupakan kebutuhan utama bagi pengunjung, akan sangat menyulitkan jika air bersih tidak tersedia. Walaupun makam mengambil air dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makam dan wisatawan tetapi masalah ini diketahui telah lama berlangsung dan belum terselesaikan. Salah satu kelemahan dari objek pariwisata budaya di Kabupaten Majene adalah lemahnya segi pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun. Meski ada beberapa tempat wisata yang infrastruktur telah di bangun dengan baik tetapi jika pemeliharaan tidak dilakukan maka sarana tersebut akan menjadi masalah juga kemudian. Kelemahan tersebut juga disoroti dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Kabupaten Majene tahun 2021.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mengetahui masalah tersebut dan mencoba mengajukannya untuk penganggaran hanya saja proses dan juga ketersediaan anggaran sedang mengalami kesulitan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar mengingat kondisi geografis makam raja-raja dan Hadat Banggae di pegunungan dengan batu-batuan yang keras dan pesisir pantai menyebabkan air yang diperoleh akan asin. Sehingga butuh usaha lebih untuk mendapatkan air yang sesuai dengan kebutuhan dari kedalaman yang sesuai. Kendati demikian Dinas pariwisata dan kebudayaan mesti mengusahakan perbaikan tersebut untuk menunjang kebutuhan pengunjung di objek wisata.

Peneliti melakukan observasi di Museum Mandar Majene saat konservasi dilakukan, dalam kesempatan itu kami melihat beberapa benda cagar budaya yang sedang dibersihkan dengan proses yang rumit. Menurut penuturan pihak yang melakukan konservasi, mereka mengatakan bahwa proses tersebut benar-benar mesti melalui pelatihan dan pendidikan agar bahan kimia yang digunakan tidak dalam takaran yang salah, sehingga tidak akan memberikan kerusakan kepada benda-benda cagar budaya. Proses konservasi tersebut sangat penting dilakukan karena benda budaya yang dipajang telah terkontaminasi oleh kotoran, mengalami kelembaban, korosi, sampai dengan sidik jari dari pengelola maupun pengunjung. Peneliti melakukan konfirmasi mengenai kurangnya fasilitas 59 sehingga hanya sebagian benda cagar budaya yang dipajang.

Diketahui bahwa anggaran yang didapatkan dinas melalui APBD tidak dapat memenuhi kebutuhan Museum, sehingga untuk kegiatan yang membutuhkan biaya yang besar, dinas harus menunggu anggaran dari APBN. Selain itu, kegiatan konservasi biasanya di jadikan tempat bagi masyarakat untuk menawarkan benda bersejarahnya, tetapi sejauh ini Dinas tidak pernah membeli benda-benda bersejarah dari masyarakat karena harganya yang mahal. Kegiatan konservasi

DOI: http://dx.doi.org/10.31605/arajang.v6i2

Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik
Volume 6. No. 2. (2023), hlm 30-39
ISSN Online: 2621-6906
Journal Homepage : https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang

dilakukan menggunakan dana pemerintah pusat karena dana pemerintah daerah tidak ada.

Ketersediaan anggaran dipengaruhi berbagai hal terutamanya terkait kondisi tidak terduga yang terjadi. Penyusunan anggaran belanja selalu dilakukan satu tahun sebelumnya. Sehingga data yang dicantumkan merupakan asumsi berdasarkan perhitungan pendapatan dan pembelanjaan tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan fluktuasi yang bisa saja terjadi. Sehingga ketika terjadi hal tidak terduga maka anggaran belanja dan target Pendapatan Asli Daerah akan terganggu. Jika target tidak dapat dicapai maka mesti memotong atau mengurangi anggaran belanja atau pengeluaran untuk menjaga anggaran pendapatan tetap stabil. Sebenarnya anggaran belanja daerah masih dapat dilakukan perubahan ketika terjadi hal yang mendesak tetapi pada tahun ini belum dilakukan, meskipun pencapaian dinas tidak memenuhi target yang diajukan tahun kemarin. Sedangkan pemerintah daerah dan seluruh dinas pemerintahan daerah telah memulai pembahasan untuk anggaran belanja tahun depan.

4. Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kebudayaan Daerah

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Majene telah merumuskan kebijakan pembangunan Kebudayaan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah. Namun mengingat cakupan kebudayaan yang sangat luas, maka pengaturan mengenai pelestarian dan pembangunan budaya perlu ditetapkan dengan sebuah Peraturan Daerah. Pariwisata tidak menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang daerah. Prioritas pembangunan akan memberikan keuntungan agar penyelenggaraan program dapat berkembang dan pemenuhan kebutuhan akan dapat berjalan dengan baik. Penyerapan anggaran akan lebih banyak mengalir ke program-program prioritas pemerintah, maka dari itu sangat penting untuk dibahas dengan baik untuk menentukan masalah yang lebih mendesak. Tetapi mesti menjadi perhatian bahwa dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Kabupaten Majene tahun 2021, terdapat target pengembangan pariwisata yang diharapkan akan berjalan optimal pada tahun 2025. Hanya saja jika dalam prioritas pembangunan ternyata pengembangan pariwisata tidak termasuk maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Kabupaten Majene tahun 2021 68 akan mengalami keterlambatan pengimplementasian. Sejauh ini saja pengembangan wisata budaya tidak masuk dalam prioritas pembangunan pemerintah daerah dan juga beberapa tempat wisata budaya yang masuk dalam rencana pengembangan wisata budaya belum juga ditindaklanjuti.

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kebudayaan Daerah merupakan produk hukum daerah yang pertama terkait dengan kebudayaan. Dalam landasan hukum pembuatannya tidak terdapat produk hukum daerah yang menjadi landasan pembuatannya. Sebagian besar

DOI: http://dx.doi.org/10.31605/arajang.v6i2

Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik
Volume 6. No. 2. (2023), hlm 30-39
ISSN Online: 2621-6906
Journal Homepage : https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang

landasan yuridis merupakan undang-undang terkait kebudayaan. Sehingga sebagai produk hukum daerah pertama maka pembuatan kebijakan ini menyita banyak perhatian khususnya oleh budayawan, pelestarian budaya serta masyarakat adat. Produk hukum ini juga memberikan banyak harapan bagi keberlangsungan kebudayaan Majene terutamanya untuk mendukung perencanaan, pengelolaan dan pengawasan aset budaya yang sudah dieksplorasi maupun belum terjamah.

Perbedaan yang sangat jelas terlihat di antara Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kebudayaan Daerah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Kabupaten Majene tahun 2021 adalah muatan dan bahasannya. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Kabupaten Majene tahun 2021 secara garis besar berfokus membahas strategi dan tantangan pengembangan pariwisata secara umum, tidak secara spesifik membahas tentang pariwisata budaya. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kebudayaan Daerah secara khusus membahas tentang kebudayaan yang di dalamnya juga mengatur pariwisata budaya. Selain itu peraturan daerah juga mengatur persoalan pengawasan pemanfaatan serta pendanaan kebudayaan, dan pembinaan sumber daya manusia yang akan mengelola wisata budaya.

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kebudayaan Daerah belum di implementasikan karena pelaksanaannya baru mulai pada tahap persiapan program dan strategi yang akan dilaksanakan dan dikembangkan. Sosialisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kebudayaan Daerah baru akan dilakukan karena narasumber yang peneliti temui belum melihat peraturan daerah tersebut, sedangkan sebelumnya mereka terlibat dalam pembuatan rancangan peraturan daerah. Pada sosialisasi tersebut nantinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menyampaikan berbagai skema dan program yang di rancang untuk mendukung kebijakan tersebut berjalan serta keterlibatan pihak lain untuk melaksanakannya.

5. Komitmen Pengembangan Wisata Budaya di Majene pada tahun 2023

Guna mencegah benda-benda bersejarah dari kerusakan, perlu menyiapkan aturan-aturan hukum yang memadai. Persoalan hukum yang sering terjadi di Indonesia yang terkait dengan sejarah peradaban dan kebudayaan kuno adalah tentang Cagar Budaya, khususnya mengenai hukum kepemilikan atas penemuan aset. Pada hakekatnya benda - benda tersebut merupakan tinggalan yang harus dilestarikan dan diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan bukti sejarah peradaban suatu bangsa, umat manusia bahkan merupakan warisan dunia, yang harus dilestarikan, dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan. Pemanfaatan cagar budaya tersebut yang menjadi potensi penyelenggaraan wisata budaya, karena melalui itu masyarakat akan memperoleh informasi terkait peninggalan sejarah melalui kunjungan. Hal tersebut menjadi sebab pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kebudayaan Daerah.

DOI: http://dx.doi.org/10.31605/arajang.v6i2

Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik
Volume 6. No. 2. (2023), hlm 30-39
ISSN Online: 2621-6906
Journal Homepage : https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang

Setelah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kebudayaan Daerah pada 27 Februari 2023 maka pelaksanaan pariwisata budaya harus mengacu kepada peraturan tersebut. Pariwisata terlebih lagi merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat berkontribusi secara aktif. Sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan pariwisata budaya.

Pariwisata termasuk wisata budaya telah berhasil mencapai target pemasukan untuk pendapatan asli daerah, bahkan melebihi target yang ditetapkan oleh 77 pemerintah daerah. Kendatipun demikian sebagai sumber pendapatan asli daerah yang cukup tinggi pemerintah tidak memberikan bantuan yang memadai untuk mengembangkan pariwisata agar meningkatkan potensi mendapatkan peningkatan pendapatan lebih tinggi lagi. Tetapi dari data jumlah pengunjung yang peneliti terima dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ketika wawancara terlihat bahwa terjadi pengurangan jumlah penjunjung sejak tahun 2019. Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan penurunan tersebut wajar karena terjadinya Covid-19, sehingga terjadi perbatasan aktivitas masyarakat.

Program tersebut menjadi program baru yang inovatif dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai usaha mengatasi masalah ketersediaan literatur budaya mandar, perluasan promosi serta usaha membentuk program kegiatan yang akan menjadi rutin dilakukan bukan hanya kegiatan tahunan. Potensi paling baik dari kegiatan yang telah dilaksanakan adalah kerja sama dengan dinas pendidikan untuk mendorong seluruh siswa dari seluruh sekolah mulai dari Sekolah Dasar, SMP dan SMA untuk melakukan kunjungan ke tempat wisata budaya. Siswa yang mengunjungi wisata budaya Majene sebagian besar berasal dari sekolah-sekolah Polewali Mandar bukan siswa Majene sendiri. 79 Program tersebut saat ini sudah mulai berjalan meskipun belum dilakukan oleh semua sekolah yang ada karena dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengaturnya.

Berdasarkan analisis dari Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kebudayaan Daerah yang berkaitan dan berkenaan dengan budaya serta upaya untuk pelestariannya maka akan memberikan dampak yang besar bagi penyelenggaraan pariwisata budaya. Terutamanya dengan beberapa persiapan kegiatan dan program yang akan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi wisata budaya lainnya, mengingat ada banyak masalah yang saat ini dihadapi oleh pelaksanaan wisata budaya. Tetapi dalam penyelenggaraan pariwisata yang di rencanakan oleh pemerintah daerah dan Dinas kebudayaan dan pariwisata, saat ini pengembangannya akan berfokus pada pariwisata bahari. Sehingga dengan adanya kebijakan kebudayaan daerah diharap dapat mendorong pengembangan pariwisata budaya.

Kesimpulan

Penelitian dilakukan untuk mengetahui upaya untuk memajukan wisata budaya dengan mempertimbangkan kondisi wisata budaya sebelum adanya kebijakan tentang kebudayaan kabupaten Majene, dapat disimpulkan bahwa kondisi wisata

DOI: http://dx.doi.org/10.31605/arajang.v6i2

budaya cukup memprihatinkan, tidak ada penambahan jumlah wisata budaya yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari tahun ke tahun karena kurangnya eksplorasi, fasilitas pendukung tidak memadai sehingga pengunjung menjadi tidak nyaman, serta kurangnya sumber daya manusia sebagai pemandu.

Selain itu sejauh ini pengembangan pariwisata budaya tidak masuk dalam prioritas pembangunan daerah dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam waktu ini lebih banyak fokus untuk mengembangkan pariwisata bahari. Sehingga tidak terlihat adanya progres baik untuk pengelolaan sarana dan prasarana wisata budaya. Dinas pariwisata dan kebudayaan serta pemerintah daerah belum melakukan promosi dan penyediaan informasi terkait pariwisata budaya dengan optimal.

Referensi

Propemperda 2022, Pemda Majene Usul 13 Ranperda - Protokol & komunikasi Pimpinan. (n.d.). Retrieved November 23, 2023, from https://humas.majenekab.go.id/2021/11/05/propemperda-2022-pemda-majene-usul-13-ranperda/

Suparno, Alfikar, G., Santi, D., & Yosi, V. (2018). Mempertahankan Eksistensi Budaya Lokal Nusantara Ditengah Arus Globalisasi Melalui Pelestarian Tradisi Gawai Dayak Sintang. Jurnal PEKAN, 3(1), 43–56.

Hartaman N. (2021). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Dan Kearifan Lokal Di Kabupaten Majene. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2

Nursaleh, Wahyuni dll. (2021). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Budaya dan Kearifan Lokal di Kabupaten Majene. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 4 No. 2.

Suparno. (2018). Mempertahankan Eksistensi Budaya Lokal Nusantara Ditengah Arus Globalisasi Melalui Pelestarian Tradisi Gawai Dayak Sintang. Jurnal Pekan Vol. 3 No. 1

A. Yoeti, Oka. 2001. Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi. Bandung: Penerbit Angkasa

Ardiwidjaja, Roby. (2018). Arkeowisata: Mengembangkan Daya Tarik Pelestarian Warisa Budaya. Yogyakarta: Deepublish.

Dr.Drs Awan Y Abdullah M.Si dan Dr. Yudirusfana M.Si., 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung, Penerbit Alfabeta.

Geriya, Wayan. 1995. Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global. Denpasar: Upada Sastra

Hardani, Dkk. 2020. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif .Yogyakarta; CV; Pustaka Ilmu

Koentjaraningrat, 2016. Pengantar Ilmu Antropologi Cetakan IV. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

DOI: http://dx.doi.org/10.31605/arajang.v6i2

Kusumastuti, Adhi. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Semarang;Lembaga pendidikan Sukarno Pressiondo

Latip Diat Prasojo, 2018. Manajemen Strategi UNY Press, Yogyakarta

Muljadi A.J, 2009., Kepariwisataan dan Perjalanan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Direktorat Jenderal Pariwisata, (2021) Pengantar Pariwisata Indonesia., Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Muslim Mufti, 2019. Teori-Teori Politik, Bandung, CV PUSTAKA SETYA

Peter Chorder, 2013. Strategi Politik. Friendrich Nauman Stiftung fur die Freiheit, Jakarta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. R&D. Bandung: Alfabeta

William N Dunn, 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik cetakan kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

DOI: http://dx.doi.org/10.31605/arajang.v6i2